



INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

itprov
SULAWESI BARAT

**MAJU &
SEJAHTERA**

RENCANA KERJA **RENJA**

INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN | 2026



INSPEKTORAT_SULBAR



INSPEKTORAT SULBAR



INSPEKT PROVSULBAR



ITPROV_SULBAR



INSPEKTORAT.SULBARPROV.GO.ID



SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 259 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 115);

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 9);
22. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12);
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 2);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penyusunan dokumen Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berdasarkan norma dan kaidah perumusan kebijakan perencanaan Perangkat Daerah yang meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah;
3. Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
6. Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
Melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi atas perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
2. Ketua:
Memimpin perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
3. Sekretaris:
Menyiapkan dukungan teknis dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Anggota:
 - a. melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



- b. melakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. melakukan analisis permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. melakukan perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- e. melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan yang bersumber dari masyarakat/kelompok masyarakat, pokok-pokok pikiran DPRD, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
- f. melakukan perumusan program, kegiatan, sub kegiatan, aktivitas/pekerjaan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, melaksanakan tugas sejak tanggal 21 Februari 2025 dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025, termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

HERDIN ISMAIL



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR : 259 TAHUN 2025

TANGGAL : 20 Maret 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Ketua
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
8.	Perencana Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Pengawas Pemerintahan Ahli Muda Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
10.	Pengawas Pemerintahan Ahli Pertama Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
11.	Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Anggota

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH

Pangkat Penata Tk.I/III.d

NIP. 19811214 201101 1 006

an. GUBERNUR SULAWESI BARAT
Plh. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HERDIN ISMAIL

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rencana kerja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 dan dokumen ini akan menjadi salah satu pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun perencanaan pembinaan dan pengawasan Tahun 2026.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 dengan baik, akan tetapi kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat menghargai setiap masukan-masukan positif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026

Mamuju, 19 Agustus 2025
Kepala Inspektorat Daerah



Drs. H.M. Natsir MM
NIP: 19661231 198603 1 116
Pangkat: Pembina Utama Madya

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT	i
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat	17
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD 2026	22
2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	29
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026	31
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah	33
4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026	34
BAB V PENUTUP	47



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) Tahun yang memuat program, kegiatan, lolasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional .

Selain itu, penyusunan Renja Kerja (Renja) perangkat daerah juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 15 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki kedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Inspektorat wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk mendukung salah satu prioritas perencanaan pembangunan daerah yaitu Kinerja Aparatur dan Birokrasi agar dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta ada keterpaduan dan keselarasan antar program- program di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Selain sebagai pedoman kerja, dengan disusunnya Rencana Kerja Inspektorat ini diharapkan dapat memantau dan mengevaluasi sampai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran pada periode-periode tertentu dan dari tahun ke tahun, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila terjadi penyimpangan ataupun perkembangan baru di lingkungan strategis yang perlu ditindaklanjuti atau diantisipasi.

Rencana Kerja Tahun Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis periode 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) merupakan suatu aktivitas dan pengambilan Keputusan di masa yang akan datang, sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan. Secara umum perencanaan kinerja ini merupakan alat manajemen sebagai upaya peningkatan kinerja yang mengutamakan daya analisis yang tajam dalam menentukan target yang realistis. Oleh karena itu dalam Rencana Kerja ini akan dicantumkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terinci untuk jangka pendek sebagai penerjemah dari sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu dalam perencanaan kinerja, tidak hanya menyangkut langkah-langkah Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian target, akan tetapi meliputi pengaturan berbagai sumber baik yang telah dimiliki, maupun yang diperlukan secara optimal.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 berpedoman pada Rancangan Awal RKPD dan hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Oleh karena itu, penyusunan Renja ini dikerjakan secara simultan dan paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

- Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 126).
 20. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 34).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2026 dengan

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut :

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk:

1. Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama satu tahun anggaran, serta untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
2. Memastikan keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat, agar bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2026 sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan

- 1.4. Sistematika penulisan
- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah
 - 4.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Inspektorat Daerah 2023 – 2026. Pada Tahun 2024, dalam melaksanakan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjalankan 3 Program, 11 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.982.918.664,-

Program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
 - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Penyediaan Bahan/Material
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 7) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 3 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Terdiri dari 4 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau Bangunan Lainnya

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Terdiri dari 7 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Reviu Laporan Kinerja
- 4) Reviu Laporan Keuangan
- 5) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
- 6) Kerjasama Pengawasan Internal
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

2) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

C. Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi

Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Terdiri dari 2 Sub Kegiatan yaitu :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

2. Pendampingan dan Asistensi

- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dari alokasi anggaran yang ada, sampai 31 Desember 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 16,885,737,414 atau 99,43 %.

Tabel 2.1
Realisasi Capaian Program Inspektorat Daerah Prov. Sulawesi Barat
Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Lingkup SKPD	BB (80)	B (82,50)	103%
2.	Penyelenggaraan Pengawasan	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100 %
3.	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persertase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi	100 %	100%	100%

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengampu 2 (dua) program utama yakni program penyelenggaraan pengawasan dan program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi.

Indikator capaian program penyelenggaraan pengawasan yaitu level kapabilitas APIP. Realiasi capaian kinerja adalah 100 %. Pencapaian target ini sangat didukung adanya penguatan dan pembaruan regulasi serta standar kerja yang jelas. Standar pengawasan yang kuat akan memberikan pedoman bagi APIP dalam menjalankan tugasnya, serta mengurangi adanya kesalahan atau kekurangan dalam melakukan pengawasan.

Selain itu, dukungan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi pengawasan, budaya pengawasan internal serta kolaborasi kemitraan dengan lembaga pengawasan lainnya juga menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mempertahankan level kapabilitas APIP.

Beberapa kendala dalam mempertahankan dan meningkatkan level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen dan pemahaman pimpinan dalam memberdayakan APIP
2. Kurangnya Kompetensi dan Profesionalisme SDM APIP

3. Sarana dan Prasarana belum memadai, terutama yang berbasis IT
4. Ruang lingkup kegiatan pengawasan terbatasKurangnya komunikasi;
5. Standar audit, Kendali Mutu serta Telaah Sejawat belum sepenuhnya diterapkan

Pada program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi menetapkan indikator capaian kinerja persentase perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan dan asistensi. Pada tahun 2024 capaian indikator kinerja 100%. Dengan capaian tersebut dapat diyakini bahwa seluruh perangkat daerah telah mendapatkan pendampingan dan asistensi atas program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Capaian tersebut tentu didukung oleh pemahaman para aparatur pengawas terhadap peran dan fungsi APIP selaku early warning system (peringatan dini) serta quality assurance (penjamin kualitas).

Capaian ini tentu perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan kedepannya. Beberapa langkah yang saat ini telah dilakukan serta upaya untuk meningkatkan capaian level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan Level 3 sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) APIP;
2. Meningkatkan Kompetensi SDM APIP;
3. Menambah kuantitas SDM APIP;
4. Memperbaiki pola rekrutmen SDM APIP;
5. Menerapkan standar audit dan kendali mutu serta telaah sejawat;
6. Melaksanakan evaluasi atas kinerja APIP (Management Oversight);
7. Sinergi dengan APIP lain untuk saling mendukung Peningkatan Kapabilitas APIP;
8. Menerapkan audit berbasis risiko,

EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

P

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/9x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%									
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Semua Bidang																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			45.920.818.486				13.679.617.688		3.733.370.927		2.824.387.029		2.220.047.329		4.806.632.813		13.584.438.098		99,30%		13.584.438.098		29,58%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup OPD (Poin)		441.185.062	0,00	-		163.126.501		27.700.000		34.550.000		31.275.000		69.595.200		163.120.200		100,00%	0,00	163.120.200		0,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4,00	74.185.062	0,00	-	3	50.355.084	1	5.200.000	1	14.700.000	1	12.775.000	-	17.680.000	3	50.355.000	100,00%	100,00%	3,00	50.355.000	75,00	67,88%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	74.000.000	0,00	-	1	20.000.000	1	3.750.000	-	4.500.000	-	2.850.000	-	8.896.500	1	19.968.500	100,00%	99,99%	1,00	19.968.500	50,00	27,03%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2,00	56.000.000	0,00	-	1	19.165.000	-	3.750.000	-	2.850.000	1	2.500.000	-	10.064.200	1	19.164.200	100,00%	100,00%	1,00	19.164.200	50,00	34,22%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	56.000.000	0,00	-	1	20.109.680	1	3.750.000	-	4.600.000	-	2.500.000	-	9.259.400	1	20.109.400	100,00%	100,00%	1,00	20.109.400	50,00	35,91%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2,00	55.000.000	0,00	-	1	18.052.481	-	3.750.000	-	2.500.000	1	3.650.000	-	8.150.600	1	18.050.600	100,00%	99,99%	1,00	18.050.600	50,00	32,82%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2,00	63.000.000	0,00	-	3	16.569.856	3	3.750.000	-	2.500.000	-	3.400.000	-	6.309.000	3	16.569.000	100,00%	99,99%	3,00	16.569.000	150,00	26,28%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7,00	63.000.000	0,00	-	4	18.884.400	1	3.750.000	1	2.900.000	1	3.600.000	1	8.633.500	4	18.883.500	100,00%	100,00%	4,00	18.883.500	57,14	29,97%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Penunjaan Lingkup OPD (Persen)	0,00	40.281.061.023	0,00	-	100	11.530.407.068	25	3.531.641.352	25	2.434.083.677	-	1.718.869.083	-	3.754.075.871	50	11.438.669.983	50,00%	99,20%	50,00	11.438.669.983	0,00%	189,65%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-Bulan)	304,00	40.132.010.065	0,00	-	77	11.478.863.504	77	3.520.391.352	77	2.426.083.677	77	1.711.369.083	77	3.729.282.571	77	11.387.126.683	100,00%	99,20%	77,00	11.387.126.683	25,33	28,37%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	100,00	125.000.000	0,00	-	4	15.794.464	1	3.750.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	7.044.300	4	15.794.300	100,00%	100,00%	4,00	15.794.300	4,00	12,64%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD (Laporan)	48,00	24.050.958	0,00	-	1	35.750.000	1	7.500.000	-	5.500.000	-	5.000.000	-	17.749.000	1	35.749.000	100,00%	100,00%	1,00	35.749.000	2,08	148,64%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Lingkup OPD (Persen)	0,00	8.000.000	0,00	-	100	-	25	-	25	-	-	-	-	-	50	-	50,00%	0,00%	50,00	-	0,00%	0,00%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4,00	8.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Lingkup OPD (Persen)	0,00	2.120.000.000	0,00	-	100	118.819.120	25	4.300.000	25	5.550.000	-	72.831.000	-	35.698.600	50	118.379.600	50,00%	99,63%	50,00	118.379.600	0,00%	57,35%
Pengadaan Pakan Dinas Besar/Abut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas Besar/Abut Kelengkapannya (Paket)	4,00	480.000.000	0,00	-	1	66.484.600	-	-	1	-	-	65.135.000	-	939.600	1	66.074.600	100,00%	99,38%	1,00	66.074.600	25,00	13,77%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvisi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s.d Tahun 2024(Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s.d tahun 2024 (%)	
		5		6		7		I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60,00	1.400.000.000	0,00		15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	120.000.000	0,00		50	52.334.520	-	4.300.000	-	5.550.000	50	7.696.000	-	34.759.000	50	52.305.000	100,00%	99,94%	50,00	52.305.000	#DIV/0!	43,59%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0,00	120.000.000	0,00		15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		#DIV/0!	0,00%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Pengelolaan Administrasi Umum (Indikator SKPD (Pemer))	0,00	140.572.395	0,00		100	657.049.301	25	72.637.220	25	93.156.900	-	108.394.620	-	382.277.241	50	656.425.981	50,00%	99,91%	50,00	656.425.981	0,00%	10318,86%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	32.000.000	0,00		1	5.678.746	-	-	-	1.742.000	1	2.364.400	-	1.474.600	1	5.581.000	100,00%	98,28%	1,00	5.581.000	25,00	17,44%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4,00	13.000.000	0,00		2	72.682.256	-	11.381.000	1	11.410.000	1	15.193.000	-	34.697.700	2	72.681.700	100,00%	100,00%	2,00	72.681.700	50,00	569,09%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4,00	5.000.000	0,00		4	60.183.226	1	11.348.650	1	7.140.000	1	21.500.000	1	20.193.000	4	60.181.650	100,00%	100,00%	4,00	60.181.650	100,00	1203,63%
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4,00	5.000.000	0,00		12	23.640.000	3	-	3	660.000	3	660.000	3	22.320.000	12	23.640.000	100,00%	100,00%	12,00	23.640.000	300,00	472,80%
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4,00	2.000.000	0,00		1	124.532.331	1	25.085.000	1	23.569.800	1	30.780.000	1	45.097.000	1	124.531.800	100,00%	100,00%	1,00	124.531.800	25,00	6226,59%
Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4,00	2.000.000	0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%
Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4,00	75.572.395	0,00		40	342.132.800	10	24.822.570	10	48.635.100	10	37.657.220	10	236.294.941	40	341.609.831	100,00%	99,85%	40,00	341.609.831	1000,00	429,31%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4,00	2.000.000	0,00		1	28.200.000	-	-	-	-	-	-	1	28.200.000	1	28.200.000	100,00%	100,00%	1,00	28.200.000	25,00	1410,00%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan BMD Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah (Pemer)	0,00	1.550.000.000	0,00		100	103.989.989	25	-	25	84.700.000	-	-	-	18.279.100	50	102.979.100	50,00%	99,03%	50,00	102.979.100	0,00%	51,49%
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4,00	1.050.000.000	0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4,00	190.000.000	0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	4,00	200.000.000	0,00		1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00		0,00	0,00%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	60,00	200.000.000	0,00		11	103.989.989	3	-	2	84.700.000	3	-	3	18.279.100	11	102.979.100	100,00%	99,03%	11,00	102.979.100	18,30	51,49%
Penyediaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Jasa Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah (Pemer)	0,00	740.000.000	0,00		100	298.917.349	25	71.296.578	25	51.530.787	-	45.625.996	-	130.458.133	50	298.911.494	50,00%	99,98%	50,00	298.911.494	0,00%	131,84%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	48,00	140.000.000	0,00		12	37.596.459	3	8.000.000	3	6.700.000	3	6.350.000	3	16.540.000	12	37.596.000	100,00%	100,00%	12,00	37.596.000	25,00	26,85%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48,00	400.000.000	0,00		12	102.746.600	3	21.558.578	3	21.080.787	3	15.575.996	3	44.475.933	12	102.691.294	100,00%	99,95%	12,00	102.691.294	25,00	25,67%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	48,00	200.000.000	0,00		12	158.629.290	3	41.738.000	3	23.750.000	3	23.700.000	3	69.436.200	12	158.624.200	100,00%	100,00%	12,00	158.624.200	25,00	79,31%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuan Pemerintahan Daerah (Pemer)	0,00	640.000.000	0,00		100	807.252.800	25	25.795.777	25	120.815.665	-	243.091.630	-	416.248.668	50	805.951.740	50,00%	99,84%	50,00	805.951.740	0,00%	1186,88%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (subkomponen) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Rangka Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran belanja tahun 2024 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rangka yang direvisi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rangka Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sd tahun 2024 (%)	
								I		II		III		IV									
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	20,00	320.000.000	0,00	-	5	43.440.000	1	10.846.635	2	13.945.392	1	10.009.564	1	8.462.179	5	43.263.770	100,00%	99,59%	5,00	43.263.770	25,00	13,52%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perawatannya (Unit)	20,00	20.000.000	0,00	-	7	170.480.000	2	13.274.142	2	78.079.823	2	22.599.566	1	56.509.709	7	170.463.240	100,00%	99,99%	7,00	170.463.240	36,00	852,32%
Pemeliharaan/Rahabiltas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltas (Unit)	4,00	200.000.000	0,00	-	1	543.465.300	-	-	1	26.190.450	-	196.223.500	-	319.943.900	1	542.357.850	100,00%	99,80%	1,00	542.357.850	25,00	271,18%
Pemeliharaan/Rahabiltas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabiltas (Unit)	4,00	100.000.000	0,00	-	1	49.867.500	1	1.675.000	1	2.600.000	1	14.259.000	1	31.332.880	1	49.866.880	100,00%	100,00%	1,00	49.866.880	25,00	49,87%
Rate-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	99,30%					
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
INSPEKTORAT DAERAH																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			18.200.000.000			2.022.354.440		203.310.000		535.141.160		489.365.120		750.231.940		2.021.078.220		99,94%		2.021.078.220		11,10%	
Penyenggaraan Pengawasan Internal	Menyinkronkan Laporan Hasil Pemeriksaan (J laporan)	0,00	12.400.000.000	0,00	-	349	660.241.040	87	92.240.000	80	139.147.940	-	135.501.000	-	292.141.831	167	659.030.771	47,86%	99,82%	167,00	659.030.771	0,00%	31,35%
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (J laporan)	336,00	4.800.000.000	0,00	-	84	362.753.400	21	79.640.000	21	82.268.305	21	129.761.000	21	70.557.000	84	362.226.305	100,00%	99,86%	84,00	362.226.305	25,00	7,55%
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (J laporan)	336,00	1.600.000.000	0,00	-	84	54.914.000	21	-	21	14.816.635	21	-	21	39.996.844	84	54.813.479	100,00%	99,82%	84,00	54.813.479	25,00	3,43%
Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja (J laporan)	336,00	1.200.000.000	0,00	-	42	45.038.272	42	-	-	-	-	-	-	44.916.000	42	44.916.000	100,00%	99,73%	42,00	44.916.000	12,50	3,74%
Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan (J laporan)	336,00	1.000.000.000	0,00	-	42	95.870.000	42	12.600.000	-	39.960.000	-	5.740.000	-	37.640.000	42	95.640.000	100,00%	99,76%	42,00	95.640.000	12,50	9,56%
Pengawasan Umum dan Teknik Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota (J laporan)	24,00	1.000.000.000	0,00	-	6	32.393.776	-	-	6	-	-	-	-	32.290.000	6	32.290.000	100,00%	99,68%	6,00	32.290.000	25,00	3,23%
Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesimpulan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	4,00	1.000.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP (Dokumen)	24,00	1.800.000.000	0,00	-	6	69.271.592	-	-	-	2.403.000	3	-	3	66.741.967	6	69.144.967	100,00%	99,82%	6,00	69.144.967	25,00	3,84%
Penyenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Menyinkronkan penyelesaian pengaduan masyarakat (Pensepsi)	0,00	5.800.000.000	0,00	-	100	1.362.113.400	25	111.070.000	25	395.963.220	-	353.894.120	-	501.090.109	50	1.362.047.449	50,00%	100,00%	50,00	1.362.047.449	0,00%	41,95%
Pemantauan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelidikan Kerugian Negara/Daerah yang Dijaringkan (J laporan)	4,00	1.000.000.000	0,00	-	4	171.450.000	1	32.070.000	1	36.770.000	1	28.340.000	1	74.260.000	4	171.440.000	100,00%	99,99%	4,00	171.440.000	100,00	17,14%
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu (J laporan)	48,00	4.800.000.000	0,00	-	100	1.190.663.400	25	79.600.000	25	359.223.220	25	325.554.120	25	426.830.109	100	1.190.607.449	100,00%	100,00%	100,00	1.190.607.449	208,33	24,86%
Rate-Rata Capaian Kinerja (%)																	100,00%	99,94%					
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi					
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			6.800.000.000			1.280.946.536		147.527.579		303.925.000		306.347.655		522.420.870		1.280.221.095		99,94%		1.280.221.095		18,83%	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Terbitnya kebijakan di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan (Dokumen)	0,00	1.600.000.000	0,00	-	2	14.230.996	-	-	-	-	-	-	-	14.172.000	-	14.172.000	0,00%	99,99%	0,00	14.172.000	0,00%	1,77%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4,00	800.000.000	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00	0,00%
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4,00	800.000.000	0,00	-	1	14.230.996	-	-	-	-	-	-	-	14.172.000	1	14.172.000	100,00%	99,99%	1,00	14.172.000	25,00	1,77%

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2023 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 (n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direvisi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra sd Tahun 2024/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra sd tahun 2024 (%)	
								I			II			III			IV										
								K	B	Rp	K	B	Rp	K	B	Rp	K	B	Rp								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%															
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya pelayanan terhadap perangkat daerah (Pemerda)	0,00	5.200.000.000	0,00	-	100	1.266.716.440	25	147.527.570	25	303.925.000	-	306.347.665	-	508.248.870	50	1.266.049.095	50,00%	99,95%	50,00	1.266.049.095	0,00%	140,10%				
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Perangkat Daerah)	168,00	800.000.000	0,00	-	42	739.867.000	42	121.850.000	42	220.080.000	42	177.030.000	42	220.740.000	42	739.700.000	100,00%	99,98%	42,00	739.700.000	25,00	92,46%				
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah)	168,00	800.000.000	0,00	-	42	41.220.000	42	-	42	-	42	-	42	41.180.000	42	41.180.000	100,00%	99,90%	42,00	41.180.000	25,00	5,15%				
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Penegakan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	48,00	2.800.000.000	0,00	-	12	263.581.440	3	8.817.570	3	750.000	3	68.027.655	3	125.703.870	12	263.299.095	100,00%	99,86%	12,00	263.299.095	25,00	7,26%				
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (Perangkat Daerah)	168,00	800.000.000	0,00	-	42	282.048.000	42	16.860.000	42	83.095.000	42	61.290.000	42	120.625.000	42	281.870.000	100,00%	99,94%	42,00	281.870.000	25,00	35,23%				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																100,00%	99,94%										
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																100,00%	99,43%										
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi										

Tabel 2.2
Realisasi Anggaran Tahun 2024

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT T.A. 2024

Kode Rekening	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	
			REALISASI BELANJA	PERSENTASE
1	2	4	5	6
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.679.617.688	13.584.438.099	101,49%
6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.126.501	163.120.200	78,38%
6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.530.407.968	11.438.669.983	100,35%
6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.819.120	118.379.600	87,86%
6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	657.049.361	656.425.981	177,58%
6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	103.989.589	102.979.100	99,03%
6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298.972.349	298.911.494	95,16%
6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	807.252.800	805.951.741	94,15%
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.022.354.440	2.021.078.220	96,26%
6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	660.241.040	659.030.771	79,22%
6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.362.113.400	1.362.047.449	107,44%
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.280.946.536	1.280.221.095	84,43%
6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	14.230.096	14.172.000	7,79%
6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	1.266.716.440	1.266.049.095	94,88%
	JUMLAH	16.982.918.664	16.885.737.414	99,43%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Program pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Setiap kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat beserta tujuan, sasaran dan indikatornya tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023 – 2026 yang dijabarkan melalui target tahunan pada dokumen Renja. Pada tahun 2024, target tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dan capaiannya dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NO	URAIAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	TINGKAT KINERJA TAHUN 2024	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi Tenaga Fungsional Auditor	Orang	8	13	5	6	120,00%	Sub Bagian Umum	
		Sertifikasi Tenaga Fungsional PPUPD	Orang	3	4	1	3	300,00%	Sub Bagian Umum	
2	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Tingkat Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	%	100,00	100,00	100	100	100,00%	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	
		Persentase temuan BPK yang diindaklanjuti	%	70,00	70,00	80	74	92,50%	Tim Tindak Lanjut	
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	Sekretariat	
		Nilai Maturitas SPIP	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	Sub Bagian Umum	
		Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	Nilai	83,00	75,00	79,00	77,00	97,47%	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus	
		Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemma	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00%	LHP BPK 2024	
		Nilai RB Lingkup Inspektorat	Predikat	B	B	B	Tidak ada Penilaian OPD		Surat Keputusan Gubernur Prov. Sulbar	
		Predikat SAKIP Provinsi	Predikat	BB	B	B	A		Surat KEMENPAN No. B/511/AA.05/2024	
		Predikat SAKIP Inspektorat	Predikat	B	B	B	A		LHE Inspektorat Daerah Prov. SULBAR No. 700.1.2.1/278/2024	
		RB Provinsi	Predikat	B	B	B	-			
		Pelayanan Publik	ZONA	KUNING	HIDAU (B)	HIDAU (B)	HIDAU (A)		Keputusan Ketua Ombudsman RI No. 252Tahun 2024	
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa target target yang belum di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditargetkan mencapai 80%, akan tetapi sampai akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 74%.

Begitu pula atas Target capaian Nilai *Monitoring Centre For Prevention* (MCP) KPK RI yang ditargetkan 79 Poin, tetapi pada akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 77 Point.

Pada Tahun 2024, capaian target Tujuan dan Sasaran secara umum telah dicapai secara maksimal, bahkan beberapa terdapat beberapa target yang capaiannya melebihi rencana target yang telah ditetapkan yakni sertifikasi tenaga fungsional Auditor dan PPUPD, dari target 6 Orang pada akhir periode Renja 2024 realisasi capaiannya mencapai 9 Orang, target nilai SAKIB dan RB Provinsi serta SAKIP OPD juga capaiannya malampui target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, Inspektorat merupakan perangkat daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dengan menjalankan fungsi penjaminan mutu (quality assurance) dan konsultasi (consulting), sehingga secara tugas pokok dan fungsi tidak melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara penuh. Adapun pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat merupakan pelayanan yang bersifat konsultatif/consulting kepada Perangkat Daerah lain.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan Inovasi di bidang pengawasan dengan mengembangkan sarana pengaduan untuk masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan terutama atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi melalui Aplikasi Whistleblowing System (WBS).

Berdasarkan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan Urusan Pengawasan Dalam penyusunan program dan kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanannya didasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut.

Selain itu, pelayanan Inspektorat berupa sarana pengaduan masyarakat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atas penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2024 melalui Whistleblowing System telah menerima sejumlah 7 Pengaduan Masyarakat yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pengaduan Masyarakat dan Tindak Lanjutnya

No	Jenis Pengaduan	Jumlah Pengaduan	Selesai	Proses	Keterangan
1	Pelanggaran/ Dugaan Pelanggaran Bidang Kepegawaian	1	1	0	Telah direkomendasikan ke pihak terkait (BKD) untuk pemberian sanksi disiplin
2	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Khusus (korupsi, gratifikasi, suap, pencucian uang, dan sejenisnya)	5	5	0	3 pengaduan ditindaklanjuti oleh Bagian TLHP Inspektorat untuk penyelesaian temuan, 1 pengaduan tindaklanjutnya diserahkan ke pihak berwenang/ instansi terkait, 1 pengaduan lainnya dilimpahkan ke pihak terkait
3	Pelanggaran Peraturan dan Ketentuan lain yang berlaku di Lingkungan Pemprov Sulawesi Barat	1	1	0	Diselesaikan dengan mediasi antara pelapor dengan terlapor

Dari tabel diatas diketahui bahwa seluruh pengaduan masyarakat yang telah disampaikan melalui saluran pengaduan WBS telah diverifikasi dan di Tindak Lanjuti seluruhnya.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat daerah yang merupakan perangkat daerah yang mampu urusan penunjang bidang pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Sesuai rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026, Inspektorat Daerah Mampu Misi 5 “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas, Tujuan 6 “memperkuat reformasi birokrasi dan sasaran 6.4 “membaiknya pengendalian dan pengawasan”

Pada kurun waktu 2023 – 2024 tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melalui dua program prioritas yakni program penyelenggaraan pengawasan dan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi beberapa target kinerja telah tercapai sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berikut gambaran capaian kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2023 -2026 sesuai capaian Rencana Strategis yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan proyeksi

capaian tahun berikut hingga akhir periode Renstra :

Tabel 2.5
Capaian Kinerja 2023 – 2024

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR	TARGET RENSTRA				CAPAIAN		PROYEKSI	
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
Tujuan :										
1	Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur pengawas	Tenaga Fungsional Pengawas Tersertifikasi	9	7	6	8	17	9	6	8
2	Meningkatnya kapasitas pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran :										
1	Meningkatnya Kapabilitas Fungsional Pengawas	Sertifikasi Tenaga Fungsional	9	7	6	8	17	9	6	8
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Persentase Tingkat Penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase temuan BPK yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	70%	74%	75%	78%
		Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Tingkat Capaian Monitoring Control Prevention (MCP) Korsupgah KPK	78	79	80	81	75	77	80	81
		Opini BPK atas penyajian laporan keuangan Pemda	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Predikat SAKIP Provinsi	B	B	B	B	B	A	A	A
		RB Provinsi	B	B	B	B	B	-	B	B
		Pelayanan Publik	HIJAU (B)	HIJAU (B)	HIJAU (B)	HIJAU (B)	KUNING	HIJAU (A)	HIJAU (A)	HIJAU (A)
		Tingkat Kepatuhan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adanya beberapa target target yang belum di capai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan yakni Tindak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang ditargetkan mencapai 80%, akan tetapi sampai akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 74%. Begitu pula atas Target capaian Nilai Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK RI yang ditargetkan 79 Poin, tetapi pada akhir periode rencana kerja hanya dapat dicapai 77 Point.

Pada Tahun 2024, capaian target Tujuan dan Sasaran secara umum telah dicapai secara maksimal, bahkan beberapa terdapat beberapa target yang capaiannya melebihi rencana target yang telah ditetapkan yakni sertifikasi tenaga fungsional Auditor dan PPUPD, dari target 6 Orang pada akhir periode Renja 2024 realisasi capaiannya mencapai 9 Orang, target nilai SAKIB dan RB Provinsi serta SAKIP OPD juga capaiannya malampui target yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tabel sebagai berikut :

1. Kurangnya Kompetensi sumber daya aparatur baik auditor maupun PPUPD.;
2. Kurangnya dukungan IT dalam penerapan fungsi pengawasan;
3. Kualitas dan Kuantitas SDM APIP baik Auditor maupun PPUD belum optimal;
4. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Perangkat Daerah belum Optimal;
5. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan yang belum memadai.
6. Kompleksitas tugas-tugas mandatory yang harus dilaksanakan;
7. Rendahnya respon perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan
8. Alokasi anggaran pengawasan belum memadai.
9. Belum terpenuhinya standar pendidikan dan pelatihan bagi aparat pengawas.
10. Belum adanya pedoman yang ketat dalam sistem mutasi masuk dan keluar ASN bagi APIP ;
11. Rendahnya pemahaman tentang SPIP dan kurangnya komitmen pimpinan perangkat daerah akan pentingnya SPIP;
12. Manajemen risiko tidak berjalan efektif, sehingga risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PD tidak dapat diidentifikasi dan

ditangani dengan baik.

Dengan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinamungan;
3. Peningkatan peran APIP melalui pembinaan , pendampingan, asistensi, consulting serta pembinaan dan pengawasan lainnya;
4. Peningkatan koordinasi antara APIP dan APH
5. Perumusan kebijakan teknis pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
7. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan.

Melalui isu-isu penting tersebut diatas, diharapkan akan berdampak positif terhadap pencapaian visi dan misi gubernur Sulawesi Barat 2025-2029 dalam rangka mewujudkan Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera begitu pula terhadap pencapaian program nasional.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan RKPD 2026

Inspektorat Dearah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan reviu terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana kerja Inspektorat menyesuaikan dengan program prioritas pemerintah daerah sehingga terdapat beberapa Sub kegiatan yang masuk dalam rancangan awal rencana kerja mengalami penyesuaian pada rancangan akhir rencana kerja. Hal tersebut dilakukan melalui analisis kebutuhan yang dapat disajikan dalam tabe berikut :

Tabel.2.5

Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026

No	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBTUHAN				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif
			Vol	Satuan				Vol	Satuan	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Realisasi	100	Persen		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Capaian Realisasi	100	Persen	
		Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	Persen			Indeks Pengelolaan Aset OPD	100	Persen	
		Indeks SPBE Perangkat Daerah	42,5	Indeks			Indeks SPBE Perangkat Daerah	42,5	Indeks	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Point			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	Point	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	95,682,400
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	20,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	19,651,400
3						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	19,126,400
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	14,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	19,955,400
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen	14,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	19,322,200
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	18,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	56,156,800
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	18,000,000					
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				

1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	OB	11,524,551,991	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77	OB	11,234,160,283
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	35,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	31,230,400
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	14,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12	Laporan	34,130,800
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	120,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	-
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77	Orang	450,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77	Orang	436,928,000
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	30,000,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	77	Orang	31,120,000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	13,829,000
2						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	74,655,000
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	44,842,000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	20,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	Dokumen	91,290,000
6	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	89,727,167
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	173,920,400
8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	100,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	41	Dokumen	281,875,200

1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	280,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10	Unit	51,707,200
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	35,000,000					
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	98,460,000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	400,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	214,420,960
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23	Unit	203,730,000
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	400,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	252,937,000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	45,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50	Unit	34,590,000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	100	Persen		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti	100	Persen	
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal yang Ditindaklanjuti	74	Persen			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal yang Ditindaklanjuti	74	Persen	
2.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	84	Laporan	1,200,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	50	Laporan	314,938,000
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	84	Laporan	500,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	73	Laporan	624,318,000
3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	84	Laporan	300,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	7	Laporan	409,920,000
4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	84	Laporan	250,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30	Laporan	61,470,000
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6	Laporan	300,000,000	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	8	Laporan	50,305,000

6	Kerja Sama Pengawasan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	250,000,000					
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Dokumen	450,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	105	Dokumen	247,763,000
2.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	250,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	44	Laporan	172,128,000
2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	12	Laporan	1,200,000,000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	39	Laporan	725,188,000
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	71.5	Point		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	71.5	Point	
3.1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	200,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	128,656,000
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	200,000,000					
3.2	Pendampingan dan Asistensi					Pendampingan dan Asistensi				
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	42	PD	200,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	70	PD	548,100,000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	42	PD	200,000,000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30	PD	41,620,000
3.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12	Kegiatan	700,000,000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	27	Kegiatan	91,699,000
1	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	42	PD	200,000,000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	29	PD	240,376,000

2.5. Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki usulan/program dari masyarakat. Namun demikian, harapan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan harus dilaksanakan melalui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan pada tahun berkenaan.

Adapun keterkaitan antara tugas pengawasan dengan pelayanan terhadap masyarakat yaitu :

1. Melakukan penanganan pengaduan masyarakat, dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintah daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Melalui pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau audit investigasi.
2. Melakukan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan pada urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yaitu diantaranya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang sosial, bidang tenaga kerja, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang lingkungan hidup, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang penanaman modal, bidang kepemudaan dan olah raga, bidang statistik, bidang persandian, bidang kebudayaan, bidang pariwisata, bidang perpustakaan dan kearsipan, bidang pertanian, bidang perdagangan, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang pemerintahan umum.
3. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah dimana dalam kegiatan reviu tersebut membandingkan kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran perangkat daerah dengan hasil musrenbang yang merupakan hasil dari usulan seluruh masyarakat,
4. Implementasi Perjanjian Kerjasama antara APIP dan APH terkait dengan pengaduan masyarakat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara maju maupun negara berkembang di Sidang Umum PBB pada September 2015. 17 Tujuan tersebut yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*
(TPB/SDGs)



Developed in collaboration with TROUBACK + COMPANY | TheGlobalGoals@troback.com | +1 212 695 1810
For queries on usage, contact: dpocampaign@un.org

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat memiliki keterkaitan erat terhadap 1 (satu) tujuan dari 17 (tujuh belas) tujuan TPB/SDGs yakni tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh dengan indikator SDGs berupa indeks perilaku anti korupsi (IPAK) yang dalam pengukurannya menggunakan angka Survei Penilaian Integritas (SPI).

3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 mengacu pada rancangan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 sebagai berikut :

3.2.1 Tujuan

Dalam upaya memujudkan misi provinsi Sulawesi Barat, Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tujuan strategis yakni “**Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)**” Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan dalam penyelenggaraan SPIP itu sendiri, yang menunjukkan seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern.

Penilaian Maturitas SPIP digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, keamanan asset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP merupakan proses yang integral dan berkelanjutan yang melibatkan pimpinan dan seluruh pegawai dalam mengendalikan kegiatan pemerintahan. Penerapan SPIP sangat diperlukan dalam membantu pencapaian tujuan pemerintah yang efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk

melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Pengendalian internal tentu dapat melengkapi pengendalian eksternal yang sudah ditegakkan pemerintah, seperti pengendalian melalui lembaga kepolisian, kejaksaan, pemberantas korupsi, pengawas keuangan maupun lembaga peradilan lainnya. Yang membedakan sistem pengendalian intern ini adalah mekanisme pengendaliannya yang lebih menjamin kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan (apalagi jika berhasil diterapkan di seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah). Prakondisi ini selanjutnya akan menghindarkan penyelenggara negara dari tuntutan hukum administrasi, perdata maupun pidana.

3.2.2 Sasaran

Tujuan yang telah ditetapkan tentu akan dicapai melalui capaian hasil dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Olehnya itu dalam rangka mencapai tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah”**

Program Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan pemerintahan daerah. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan berarti meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pengawasan, yang mencakup penggunaan sumber daya yang lebih baik, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kompetensi personil pengawas. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat konstruktif dan bermanfaat serta memastikan bahwa hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2025-2029

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target				
				2026	2027	2028	2029	2030
Membaihnya pengendalian dan pengawasan	Meningkatkan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah	Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3,30)	Level 3 (3,35)	Level 3 (3,40)	Level 3 (3,45)	Level 3 (3,50)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Eksternal dan Internal Yang Terselesaikan Tahun n-1	74	76	78	80	82

Sebagaimana tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat pada tabel diatas dan isu-isu penting yang harus diselesaikan pada tahun 2026 maka prioritas rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 diantaranya :

1. Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Meningkatkan Kapabilitas APIP
3. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan APIP
4. Menyelesaikan seluruh tindak lanjut pengaduan masyarakat
5. Meningkatkan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2026

Rencana Kerja 2026 menggunakan program dan kegiatan yang telah dipetakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 kedalam program sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Permendagri nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Serta Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Inspektorat Daerah memiliki 1 (satu) program penunjang dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 2 (dua) program teknis dengan 4 (Empat) kegiatan yang mendukung rencana kerja Tahun 2026 antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari 7 Kegiatan yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaran Pengawasan
- Program penyelenggaraan pengawasan terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
- 1) Penyelenggaran Pengawasan Internal
 - 2) Penyelenggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
3. Program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi terdiri dari 2 Kegiatan yaitu :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - 2) Pendampingan dan Asistensi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Program Kerja Tahun 2026 mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang disajikan dalam tabel Casecading sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program Kegiatan Prirotas Tahun 2026

RPJMD 2025-2029			RKPD 2026	RENJA PD 2026		
Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Akuntabel serta Mewujudkan Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Memperkuat Reformasi Birokrasi	Membaihnya Pengendalian dan Pengawasan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ➤ Peningkatan sistem dan budaya pemerintahan yang anti KKN	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
						Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
						Reviu Laporan Kinerja
						Reviu Laporan Keuangan
						Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
						Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
					Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4.2 Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT DAERAH						17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik Indeks SPBE Perangkat Daerah Capaian Realisasi Anggaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-			94 Persen 4.24 Poin 100 Persen 83 Poin	13.623.448.010,00						-	16.102.551.991,00	
		[Meningkatkan Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100.00 4.40 84.20	4.14 82.50 90.00 99.90	100.00 4.19 82.70 92.00	100.00 4.24 83 94.00	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.01	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-			1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen	229.894.600,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	95.682.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterliban Masyarakat	Inspektorat		20.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	19.651.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterliban Masyarakat	Inspektorat		20.000.000,00	IINSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19.126.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintah an yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterliban Masyarakat	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	19.955.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	19.322.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Inspektorat		14.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	56.156.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Inspektorat		18.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			12 Dokumen 77 ASN	11.299.521.483,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	11.732.551.991,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/ Bulan	11.234.160.283,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		11.524.551.991,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	31.230.400,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	34.130.800,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		8.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100.00 4.40 84.20	4.14 82.50 90.00 99.90	100.00 4.19 82.70 92.00	100.00 4.24 83 94.00	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	-			77 Orang 77 Orang 77 Orang	468.048.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	970.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		120.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				77 Orang	436.928.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				77 Orang	31.120.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-			1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Laporan 1 Paket 1 Paket 41 Dokumen	770.138.767,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100.00 4.40 84.20	4.14 82.50 90.00 99.90	100.00 4.19 82.70 92.00	100.00 4.24 83 94.00	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	173.920.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				41 Dokumen	281.875.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-			10 Unit	51.707.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	51.707.200,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		[Meningkatnya Dukungan Manajemen Perangkat Daerah]	Capaian Realisasi Anggaran Indeks SPBE Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100.00 4.40 84.20	4.14 82.50 90.00 99.90	100.00 4.19 82.70 92.00	100.00 4.24 83 94.00	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-			1 Laporan 1 Laporan	312.880.960,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	700.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	98.460.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	214.420.960,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	-			1 Unit 23 Unit 50 Unit	491.257.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat	-	750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	203.730.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	252.937.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		400.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	13.623.448.010,00	-	-	-	-	-	-	16.102.551.991,00	-
	6.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	34.590.000,00	Kab. Mamuju, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan an yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Inspektorat		50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti Tindaklanjut Rekomendasi BPK	-			100 Persen 74 Persen	2.606.030.000,00						-	14.450.000.000,00	
		[Menurutnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan]	Pengaduan Masyarakat Memenuhi Syarat yang Ditindaklanjuti Tindaklanjut Rekomendasi BPK	100 80	100 70	100 72	100 74	2.606.030.000,00	-	-	-	-	-	-	14.450.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				39 Laporan	725.188.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Perangkat Daerah		1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	-			71,50 Poin	1.050.451.000,00						-	4.350.000.000,00	
		[Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi]	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	73	70.80	71	71.50	1.050.451.000,00	-	-	-	-	-	-	4.350.000.000,00	-
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	-			2 Rekomendasi	128.656.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Perangkat Daerah	-	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	128.656.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-			29 Perangkat Daerah 70 Perangkat Daerah 27 Kegiatan 30 Perangkat Daerah	921.795.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah	-	4.150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				70 Perangkat Daerah	548.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		1.750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30 Perangkat Daerah	41.620.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				27 Kegiatan	91.699.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				29 Perangkat Daerah	240.376.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	PP-5 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Perangkat Daerah		200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	J U M L A H							17.279.929.010,00							34.902.551.991,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 masih dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan masih akan melalui proses desk Rencana Kerja dan evaluasi Gubernur yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, Indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran RPJMD, disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 - 2029.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026, yang akan memuat indikator maupun penjabaran pagu anggaran yang lebih rinci.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 ini disusun agar bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Mamuju, 19 Agustus 2025
Kepala Inspektorat Daerah,



Drs. H.M. Natsir MM
NIP: 19661231 198603 1 116
Pangkat: Pembina Utama Madya